ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Tani Sorgum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur

Maria Sriyati Tewo Kung[1], William Djani[2], Adriana R. Fallo[3], Jim Brand Kolianan[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
mariasriyati2001@gmail.com

Article History:
Received: 23 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Tani, Sorgum, Kesejahteraan Petani, Pemerintah Desa.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Sorgum Herin Lela Likotuden dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang ditentukan secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan melalui dimensi enabling, empowering, dan protecting. Pada dimensi enabling, petani memperoleh akses terhadap lahan, sumber daya pertanian, bantuan, dan kelembagaan kelompok tani. Pada dimensi empowering, penyuluhan, pelatihan, dan keterlibatan dalam Musrenbang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta partisipasi petani, meskipun penerapan teknologi dan pengembangan pemasaran masih terbatas. Pada dimensi protecting, pemerintah desa memberikan dukungan dana, alat pertanian, perluasan lahan, dan bantuan administrasi. Namun, monitoring masih bersifat reaktif, evaluasi belum berbasis data produksi dan pendapatan, akses pasar masih terbatas, serta belum tersedia kebijakan desa yang secara khusus melindungi pengembangan usaha sorgum. Dengan demikian, pemberdayaan telah memberikan manfaat bagi petani, tetapi masih memerlukan penguatan pendampingan, pemasaran, evaluasi program, dan perlindungan usaha tani secara berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan basis ekonomi masyarakat pedesaan karena berperan dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun,

besarnya jumlah rumah tangga petani belum selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan BPS (2023), terdapat 27.368.144 rumah tangga petani di Indonesia, tetapi sebagian masih menghadapi rendahnya produktivitas, keterbatasan teknologi, sarana produksi, modal, informasi, dan akses pasar.

Salah satu komoditas yang potensial dikembangkan di wilayah lahan kering adalah sorgum. Tanaman ini memiliki daya adaptasi yang baik terhadap kekeringan, dapat tumbuh pada lahan marginal, serta relatif tahan terhadap hama dan penyakit. Kondisi agroekologi Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh lahan kering menjadikan sorgum sesuai untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif dan sumber pendapatan masyarakat (Benu & Mudita, 2013; Hanggarawati et al., 2024; Mudita, 2013).

Pengembangan sorgum memerlukan pemberdayaan petani yang tidak hanya berbentuk bantuan sarana produksi, tetapi juga peningkatan pengetahuan, keterampilan, kelembagaan, teknologi, dan akses pasar. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menegaskan bahwa pemberdayaan petani diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan petani (Suelain et al., 2025). Hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan berdasarkan potensi serta kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kelompok tani yang berfungsi sebagai wadah belajar, kerja sama, dan unit produksi. Melalui kelompok tani, petani dapat meningkatkan keterampilan, mengelola sumber daya secara bersama, serta memperkuat posisi tawar terhadap pasar dan lembaga pendukung. Oleh sebab itu, petani perlu ditempatkan sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan (Sunyoto Usman, 2004, dalam Mustofa et al., 2020; Sari & Darmawan, 2020; Wijayanti, 2020).

Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, merupakan salah satu desa yang mengembangkan sorgum. Berdasarkan data Kantor Desa Kawalelo tahun 2026, sebanyak 329 orang penduduk bekerja sebagai petani. Namun, sebagian besar petani masih menjalankan pertanian secara musiman, bergantung pada cuaca, serta memiliki keterbatasan dalam pengelolaan lahan dan usaha tani. Kondisi ini menyebabkan hasil produksi dan pendapatan petani belum stabil.

Untuk meningkatkan kapasitas petani, dibentuk Kelompok Tani Sorgum Likotuden Herin Lela yang beranggotakan 50 orang. Pada tahun 2026, Pemerintah Desa Kawalelo mengalokasikan Rp117.175.000,00 untuk mendukung kegiatan persiapan lahan, penanaman, dan pembersihan lahan. Program ini juga didukung oleh Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Larantuka melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan petani.

Meskipun memiliki potensi lahan, dukungan anggaran, kelompok tani, dan lembaga pendamping, pengembangan sorgum belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan petani. Petani masih menghadapi keterbatasan fasilitas, teknologi, pelatihan, sarana pengolahan, dan akses pasar. Sorgum gelondongan dijual sekitar Rp9.000,00 per kilogram, sedangkan sorgum olahan dapat mencapai Rp20.000,00 per kilogram. Namun, sebagian besar petani masih menjual sorgum dalam bentuk gelondongan karena pasar produk olahan belum berkembang secara optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan belum dilaksanakan secara menyeluruh. Perencanaan program belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan petani, koordinasi antaraktor masih lemah, dan evaluasi program masih berorientasi pada administrasi. Program juga lebih banyak diarahkan pada kegiatan produksi daripada penguatan manajemen usaha, pengolahan hasil, kelembagaan, dan pemasaran.

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan Mulyawan (2016), yang meliputi enabling,

empowering, dan protecting. Pada aspek enabling, petani masih memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas, teknologi, informasi, dan pasar (Musafiri et al., 2026). Pada aspek empowering, kapasitas kelembagaan, partisipasi, dan kemampuan pengelolaan usaha tani belum optimal. Sementara itu, pada aspek protecting, belum terdapat perlindungan yang terintegrasi terhadap risiko perubahan iklim, kegagalan panen, fluktuasi harga, dan ketidakmerataan bantuan.

Penelitian terdahulu telah membahas pemberdayaan melalui budidaya sorgum, peran kelompok tani, dan peran pemerintah desa (Dewi et al., 2020; Matofani & Rahaju, 2023; Pangaribuan & Kurniaty, 2025; Syafira & Dewi Rahmi, 2022). Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis pemberdayaan kelompok tani sorgum melalui aspek enabling, empowering, dan protecting di Desa Kawalelo masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Sorgum Likotuden Herin Lela dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data berupa kata-kata tertulis, lisan, dan perilaku subjek yang diamati (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2013). Penelitian bertujuan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani sorgum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur.

Fokus penelitian mengacu pada tiga dimensi pemberdayaan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* meliputi akses petani terhadap sumber daya alam serta pembentukan dan pengembangan kelompok tani. *Empowering* mencakup penyuluhan, pelatihan, informasi teknologi, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani. Adapun *protecting* meliputi monitoring, penilaian program, dan kerja sama antara petani dengan pemerintah desa.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang mengetahui dan terlibat langsung dalam pemberdayaan petani sorgum (Sugiyono, 2017 dalam Dini & Pasaribu, 2021). Informan berjumlah 16 orang, terdiri atas pejabat desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua kelompok tani, pendamping tani, Ketua Himpunan Petani Sorgum Kabupaten Flores Timur, serta 10 petani.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, peraturan, laporan, arsip, dan dokumen pemerintah desa (Moleong, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan pertanian dan kelompok tani, serta dokumentasi berupa arsip, laporan, foto, dan rekaman kegiatan.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar-informan dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Tani Sorgum dalam Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Kawalelo

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang mampu menentukan dan mengembangkan kehidupannya secara mandiri.

Di Desa Kawalelo, pemberdayaan petani dilakukan melalui penyediaan akses terhadap sumber daya pertanian, seperti alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, informasi, pelatihan teknis, serta penyuluhan. Upaya tersebut diperkuat melalui pembentukan kelompok tani, peningkatan keterampilan usaha tani, penguatan kelembagaan lokal, dan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha petani.

Pelaksanaan pemberdayaan dianalisis menggunakan tiga dimensi yang dikemukakan Mulyawan (2016), yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* berkaitan dengan pemberian akses dan kesempatan kepada petani untuk memanfaatkan sumber daya. *Empowering* menekankan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani. Sementara itu, *protecting* berkaitan dengan perlindungan petani dari berbagai risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, pembahasan selanjutnya menguraikan pelaksanaan pemberdayaan melalui Kelompok Tani Sorgum dalam meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur.

Enabling: Pemberian Akses kepada Petani

Dimensi *enabling* berkaitan dengan penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengenali dan mengembangkan potensinya melalui akses terhadap sumber daya dan kelembagaan. Dalam penelitian ini, *enabling* dianalisis melalui dua aspek, yaitu akses petani terhadap sumber daya alam serta pembentukan dan pengembangan Kelompok Tani Sorgum Herin Lela Likotuden.

1. **Akses terhadap Sumber Daya Alam**

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kawalelo memiliki akses terhadap tanah, air, dan hasil hutan untuk menunjang kehidupan dan kegiatan pertanian. Namun, akses terhadap air masih terbatas karena kegiatan pertanian sangat bergantung pada curah hujan dan umumnya hanya menghasilkan satu kali panen dalam setahun. Damianus Ukun Kolah, salah seorang petani sorgum, menyatakan:

   "Air di desa ini sebenarnya cukup ada. Kami di sini hanya satu kali musim panen dalam setahun, jadi selama ini sangat bergantung pada air hujan. Akan tetapi, dengan adanya tanaman sorgum yang bisa hidup di musim kemarau, kami mulai terbantu karena tidak sepenuhnya bergantung pada musim hujan lagi."

   Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan sistem pengairan belum sepenuhnya menghambat kegiatan pertanian karena petani mengembangkan sorgum sebagai tanaman yang adaptif terhadap kondisi lahan kering. Budidaya sorgum menjadi bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan air sekaligus membuka peluang untuk mempertahankan produktivitas pertanian pada musim kemarau.

   Akses terhadap tanah relatif terbuka karena masyarakat dapat mengelola lahan milik sendiri, membuka lahan baru, atau bekerja bersama anggota kelompok tani. Pejabat Desa Kawalelo, Antonius N. Kolin, menjelaskan bahwa masyarakat menentukan lokasi dan luas lahan yang akan dikelola secara mandiri maupun secara berkelompok. Pola tersebut menunjukkan adanya keleluasaan dalam pemanfaatan lahan sekaligus praktik gotong royong dalam pembukaan dan perluasan lahan pertanian.

   Masyarakat juga masih memanfaatkan hasil hutan, seperti kayu bakar, rotan, dan tanaman obat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperoleh tambahan pendapatan. Pemanfaatannya telah diatur oleh pemerintah desa agar masyarakat tidak

melakukan penebangan dan pengambilan hasil hutan secara berlebihan. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap sumber daya alam bersifat relatif terbuka, tetapi tetap dikendalikan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

2. Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Tani

Aspek kedua dalam dimensi *enabling* adalah pembentukan dan pengembangan kelompok tani. Budidaya sorgum di Dusun Likotuden mulai dikembangkan sejak tahun 2014 melalui pendampingan YASPENSEL Keuskupan Larantuka. Kelompok Tani Sorgum Herin Lela Likotuden kemudian resmi berdiri pada 12 Oktober 2016 dengan badan hukum Nomor 09/BH/XXXIX.4/2016. Pembentukan kelompok tersebut didasarkan pada kesamaan mata pencaharian dan kebutuhan petani untuk mengatasi keterbatasan modal, pengetahuan, tenaga kerja, dan akses terhadap bantuan pertanian.

Keberadaan kelompok tani mempermudah petani memperoleh bibit, pupuk, alat pertanian, penyuluhan, dan program pemerintah. Kelompok juga menjadi wadah kerja sama dalam pembukaan lahan, penanaman, pemecahan masalah, dan kegiatan panen. Hermanus Heru Hera menjelaskan bahwa bantuan pemerintah umumnya disalurkan melalui kelompok tani dan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan karena dilaksanakan secara gotong royong.

Pengembangan kelompok dilakukan melalui penyuluhan dari Dinas Pertanian mengenai pengolahan lahan, pengaturan jarak tanam, pembagian kerja, dan pemasaran hasil pertanian. Ketua kelompok tani, Yosep Atan Hera, menyatakan bahwa penyuluhan tersebut membantu petani mengenal teknik budidaya yang lebih baik, meskipun penerapannya masih berlangsung secara bertahap karena sebagian anggota masih menggunakan cara-cara tradisional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi *enabling* telah berjalan melalui terbukanya akses terhadap tanah dan hasil hutan, pemanfaatan sorgum sebagai respons terhadap keterbatasan air, serta terbentuknya kelompok tani sebagai sarana memperoleh bantuan, informasi, dan kerja sama. Namun, proses ini belum sepenuhnya optimal karena petani masih bergantung pada curah hujan, bantuan pemerintah, dan kerja kolektif kelompok. Perubahan dari pola pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih modern dan mandiri juga masih berlangsung secara bertahap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Matofani dan Rahaju (2023), yang menemukan bahwa pemberdayaan melalui budidaya sorgum dapat meningkatkan produktivitas melalui penyediaan akses terhadap sumber daya dan penguatan kelembagaan masyarakat. Temuan ini juga mendukung penelitian Pangaribuan dan Kurniaty (2025), yang menegaskan pentingnya peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam menyediakan akses dan memperkuat kelembagaan kelompok tani.

***Empowering*: Peningkatan Kapasitas Petani**

Dimensi *empowering* menekankan peningkatan pengetahuan, keterampilan, partisipasi, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, peningkatan kapasitas petani sorgum di Desa Kawalelo dianalisis melalui tiga aspek, yaitu penyuluhan informasi dan teknologi, pelatihan kepada petani, serta pemberian ruang untuk menyampaikan gagasan dalam perencanaan pembangunan desa.

1. Penyuluhan Informasi dan Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian telah membantu petani

memperoleh pengetahuan mengenai pengolahan lahan, pemilihan bibit, pengaturan jarak tanam, perawatan tanaman, dan penanganan hasil panen. Penyuluhan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, petugas lapangan, serta lembaga pendamping kurang lebih tiga kali dalam setahun. Kegiatan tersebut penting karena penyuluhan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong petani menerapkan praktik pertanian yang lebih efektif dan produktif (Abel et al., 2024).

Ketua Kelompok Tani Sorgum Herin Lela Likotuden, Yosep Atan Hera, menjelaskan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, petani umumnya menggunakan cara bertani yang diwariskan secara turun-temurun. Setelah memperoleh penyuluhan, petani mulai memahami teknik pengelolaan lahan, pemilihan bibit, dan pengaturan jarak tanam secara lebih teratur. Hal yang sama disampaikan Wilhelmus Murin Hera bahwa penyuluhan membantu petani memperbaiki cara menanam, meskipun belum seluruh anggota langsung menerapkan metode baru.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan telah meningkatkan pengetahuan dan keterbukaan petani terhadap inovasi pertanian. Namun, perubahan dari pola pertanian tradisional menuju metode yang lebih efektif masih berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, penyuluhan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan disertai pendampingan agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam kegiatan usaha tani.

2. Pelatihan kepada Petani

Pelatihan merupakan bentuk peningkatan kapasitas yang menekankan pembelajaran praktis. Di Desa Kawalelo, pelatihan diberikan oleh Dinas Pertanian dan petugas lapangan mengenai pengolahan tanah, pemilihan benih, teknik penanaman, pengaturan jarak tanam, dan perawatan tanaman. Kegiatan ini membantu petani meningkatkan keterampilan teknis sekaligus memperkenalkan sorgum sebagai tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan kering dan keterbatasan air.

Paulus Ado Kolah menjelaskan bahwa pelatihan telah membuat petani memahami cara mengelola lahan dan merawat tanaman secara lebih teratur. Sementara itu, Gregorius Suba Tobin menyatakan bahwa pelatihan sangat membantu petani mengenali teknik penanaman yang lebih baik, meskipun sebagian anggota masih terbiasa menggunakan cara lama. Dengan demikian, pelatihan telah memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan keterampilan petani, tetapi penerapannya belum merata.

Pelatihan yang diberikan selama dua tahun terakhir masih lebih banyak berfokus pada aspek budidaya. Materi mengenai pengolahan hasil, pengemasan, pemasaran, dan pengembangan nilai tambah sorgum masih terbatas. Hal ini terlihat dari harga jual sorgum yang tidak mengalami perubahan berarti meskipun keterampilan budidaya petani telah meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas teknis belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas ekonomi dan pendapatan petani.

3. Pemberian Gagasan atau Ide

Peningkatan kapasitas juga terlihat dari keterlibatan petani dalam menyampaikan gagasan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat dusun, desa, dan kecamatan. Melalui forum tersebut, kelompok tani dapat mengusulkan kebutuhan berupa bibit, pupuk, alat pertanian, pelatihan, dan dukungan teknologi. Usulan yang disepakati kemudian dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan APBDes untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa.

Sekretaris Desa Kawalelo, Dominikus Wuring Kolah, menjelaskan bahwa kelompok tani menyampaikan usulan melalui Musrenbang, kemudian hasilnya dimasukkan

dalam APBDes dan diajukan untuk proses asistensi. Yustina Jawa Hera dan Paulina Roma Hera juga menyatakan bahwa petani telah diberi kesempatan menyampaikan kebutuhan, tetapi tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan penentuan prioritas pembangunan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang telah memberikan ruang formal bagi petani untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Namun, gagasan yang disampaikan masih didominasi kebutuhan dasar, seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian. Usulan yang berkaitan dengan inovasi budidaya, pengolahan pascapanen, akses pasar, serta pengembangan usaha masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas petani dalam merumuskan gagasan yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang masih perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, dimensi *empowering* telah dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan, dan keterlibatan petani dalam Musrenbang. Kegiatan tersebut meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi petani dalam pengelolaan usaha tani sorgum. Namun, pemberdayaan belum sepenuhnya optimal karena penerapan teknologi masih bertahap, materi pelatihan masih berorientasi pada budidaya, dan gagasan petani belum banyak menyentuh pengolahan hasil serta pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan dan pengembangan pelatihan yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, kewirausahaan, serta pemasaran hasil sorgum.

Temuan ini sejalan dengan Matofani dan Rahaju (2023), yang menyatakan bahwa budidaya sorgum dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas petani. Hasil penelitian ini juga mendukung Dewi et al. (2020), yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diperkuat melalui proses penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Protecting: Perlindungan dan Keberlanjutan Usaha Petani

Dimensi *protecting* berkaitan dengan upaya melindungi petani, sumber daya, dan keberlanjutan usaha pertanian dari berbagai risiko yang dapat melemahkan posisi mereka. Dalam penelitian ini, perlindungan terhadap petani sorgum di Desa Kawalelo dianalisis melalui tiga aspek, yaitu monitoring atau pengamatan langsung, penilaian program, serta kerja sama antara petani dan pemerintah desa.

1. Monitoring atau Pengamatan Langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring kegiatan pertanian telah dilakukan oleh pemerintah desa dan pendamping pertanian, tetapi belum berjalan secara rutin dan sistematis. Pendamping umumnya turun ke lapangan setelah menerima usulan atau keluhan dari petani. Petrus Lawe Kolah menjelaskan bahwa pendamping datang ketika terdapat kebutuhan bantuan atau masalah yang dilaporkan oleh petani. Berbeda dengan sebelumnya, pendamping tidak lagi berkantor dan melakukan pendampingan secara intensif di desa.

Monitoring pemerintah desa juga masih lebih banyak diarahkan pada pendataan kebutuhan petani, seperti alat pertanian, bibit, dan pupuk, untuk dimasukkan ke dalam APBDes. Hermanus Beliko Kolah menyatakan bahwa keluhan petani didata oleh pemerintah desa sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan. Namun, monitoring terhadap penggunaan bantuan, perkembangan tanaman, hasil panen, dan perubahan pendapatan belum dilakukan secara teratur.

Hal tersebut diperkuat oleh Marselina Boleng Hera yang menyatakan bahwa belum terdapat pendataan hasil panen ataupun kewajiban pelaporan hasil usaha tani. Akibatnya,

pemerintah desa sulit menilai efektivitas bantuan dan mengidentifikasi kendala petani secara dini. Dengan demikian, monitoring masih bersifat reaktif, karena dilakukan setelah muncul keluhan, bukan melalui kunjungan lapangan dan pencatatan hasil secara berkala. Monitoring perlu diperkuat melalui jadwal kunjungan rutin, pencatatan produksi setiap musim, dan pelaporan kendala petani sebagai dasar perbaikan program.

2. Penilaian Program

Program pertanian di Desa Kawalelo diarahkan pada peningkatan produksi tanaman pangan melalui penyediaan alat produksi, pengolahan, dan penggilingan. Pada tahun 2024, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp134.379.000,00 dan meningkat menjadi Rp147.368.000,00 pada tahun 2025. Bantuan yang diberikan antara lain berupa mesin penepung, mesin penyosoh, mesin pemeras batang, mesin pencacah, dan mesin penyortir sorgum.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan tersebut membantu petani mengolah lahan dan hasil panen secara lebih mudah dan efisien. Antonius N. Kolin menjelaskan bahwa bantuan alat pertanian diberikan secara bertahap untuk mendukung peningkatan hasil usaha tani. Bonifasius Soge Kolah juga menyatakan bahwa jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan petani, sedangkan Maria Fatima Kiwan menilai bahwa penggunaan peralatan modern mampu menghemat waktu dan tenaga petani.

Meskipun memberikan manfaat, keberhasilan program belum diukur menggunakan indikator yang jelas. Petani menyatakan adanya peningkatan hasil, tetapi produksi masih dihitung menggunakan ukuran lokal berupa bakul dan belum dikonversi ke dalam satuan berat maupun nilai pendapatan. Penilaian program karena itu masih bertumpu pada persepsi penerima manfaat dan realisasi bantuan, belum pada data produktivitas, peningkatan pendapatan, efisiensi kerja, dan keberlanjutan usaha tani.

Program juga belum sepenuhnya melindungi petani dari risiko kekeringan, serangan hama, kegagalan panen, dan fluktuasi hasil. Walaupun sorgum relatif tahan terhadap lahan kering, kegiatan budidaya masih bergantung pada curah hujan dan umumnya hanya dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu, penilaian program perlu dilengkapi dengan indikator hasil dan dampak agar pemerintah desa dapat mengetahui efektivitas program secara objektif.

3. Kerja Sama Petani dan Pemerintah Desa

Kerja sama antara petani dan Pemerintah Desa Kawalelo diwujudkan melalui dukungan dana, penyediaan sarana pertanian, perluasan lahan, serta bantuan administrasi dalam penyusunan proposal kepada dinas pertanian tingkat kabupaten dan provinsi. Pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp117.175.000,00 kepada 50 anggota kelompok tani atau sebesar Rp2.343.500,00 per anggota untuk mendukung kegiatan budidaya sorgum.

Bantuan tersebut dikelola melalui mekanisme pengembalian modal. Setiap anggota mengembalikan dana sebesar Rp2.343.500,00 dan menyerahkan 25 kilogram sorgum. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dana bergulir sekaligus membangun tanggung jawab anggota terhadap program pemberdayaan yang diterima.

Antonius N. Kolin dan Dominikus Wuring Kolah menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator melalui dukungan anggaran, perluasan lahan, serta pengurusan administrasi proposal bantuan. Dari pihak kelompok tani, Bibana Hingi Kiwan dan Maria Romat Hera mengakui bahwa dukungan pemerintah desa memudahkan kelompok memperoleh bantuan dan mengembangkan lahan sorgum.

Meskipun kerja sama telah berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala. Penyaluran bantuan terkadang terlambat, komunikasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah desa belum konsisten, serta akses pemasaran hasil sorgum masih terbatas. Selain itu, belum terdapat peraturan desa yang secara khusus mengatur pengembangan dan perlindungan usaha pertanian sorgum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama masih dominan pada pemberian bantuan produksi dan administrasi, sedangkan perlindungan harga, akses pasar, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan usaha belum berkembang secara optimal.

Secara keseluruhan, dimensi *protecting* di Desa Kawalelo telah diwujudkan melalui monitoring, bantuan sarana pertanian, dukungan dana, dan kerja sama antara pemerintah desa dengan kelompok tani. Namun, perlindungan terhadap petani belum sepenuhnya optimal karena monitoring masih bersifat reaktif, penilaian program belum berbasis indikator hasil, akses pasar masih terbatas, dan regulasi desa belum tersedia. Oleh karena itu, diperlukan monitoring berkala, pencatatan hasil produksi, evaluasi berbasis dampak, penguatan koordinasi, perluasan akses pasar, serta penyusunan kebijakan desa yang menjamin keberlanjutan usaha tani sorgum.

Temuan ini sejalan dengan Pangaribuan dan Kurniaty (2025), yang menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah dalam pemberdayaan kelompok tani. Hasil penelitian ini juga mendukung Syafira dan Dewi Rahmi (2022), yang menegaskan bahwa kelompok tani merupakan wadah kerja sama yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui koordinasi dan kolaborasi antaraktor.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Sorgum Herin Lela Likotuden di Desa Kawalelo telah dilaksanakan melalui tiga dimensi, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Pada dimensi *enabling*, masyarakat telah memperoleh akses terhadap lahan, sumber daya alam, bantuan pertanian, serta kelembagaan kelompok tani. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah kerja sama, gotong royong, penyaluran bantuan, dan pengembangan usaha sorgum. Namun, petani masih menghadapi keterbatasan sumber air dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Pada dimensi *empowering*, penyuluhan, pelatihan, dan keterlibatan dalam Musrenbang telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi petani. Petani mulai menerapkan teknik pengolahan lahan, pemilihan bibit, dan pengaturan jarak tanam yang lebih baik. Meskipun demikian, penerapan teknologi masih berlangsung secara bertahap, sedangkan pelatihan masih berfokus pada kegiatan budidaya dan belum optimal menyentuh pengolahan hasil, pemasaran, serta peningkatan nilai ekonomi sorgum.

Pada dimensi *protecting*, pemerintah desa telah memberikan dukungan dana, alat pertanian, perluasan lahan, dan bantuan administrasi kepada kelompok tani. Namun, perlindungan terhadap petani belum berjalan optimal karena monitoring masih bersifat reaktif, evaluasi program belum berbasis data produksi dan pendapatan, akses pasar masih terbatas, serta belum terdapat kebijakan desa yang secara khusus mengatur pengembangan sorgum. Dengan demikian, pemberdayaan telah memberikan manfaat bagi petani, tetapi masih perlu diperkuat melalui pendampingan berkelanjutan, evaluasi berbasis hasil, pengembangan pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan kebijakan perlindungan usaha tani sorgum.

DAFTAR REFERENSI

Abel, A., Obel, G., & Akuno, W. (2024). Assessment of the contribution of agricultural extension

services on sorghum production for improved food security among smallholder farmers in Rachuonyo North Sub-County, Homa Bay County, Kenya. *International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 25*(1), 9–18. https://innspub.net/assessment-of-the-contribution-of-agricultural-extension-services-on-sorghum-production-for-improved-food-security-among-smallholder-farmers-in-rachonyo-north-sub-county-homa-bay-county-kenya/

Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023: Rumah tangga usaha pertanian*. https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023

Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur. (2021). *Kecamatan Demon Pagong dalam angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur.

Benu, F. L., & Mudita, I. W. (2013). *Revisitasi lahan kering: Diskusi ringan seputar lahan kering dan pertanian lahan kering*. JP II Publishing House.

Hanggarawati, P. S., Nilasari, B. M., & Jakaria, J. (2024). Analysis of sorghum local food development community-based for food security and nutrition in Lembata and East Flores, East Nusa Tenggara Province. *International Journal of Engineering Business and Social Science, 2*(4), 1232–1242. https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i04.156

Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tirtawangunan, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian, 2*(1), 191–198.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani*.

Matofani, A. R., & Rahaju, T. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya sorgum di Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. *Publika, 11*(3), 2283–2292. https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2283-2292

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, wilayah, dan pembangunan*. UNPAD Press.

Musafiri, C. M., Kiboi, M., Ng'etich, O. K., Zeila, A., & Ngetich, F. K. (2026). Determinants of market participation and intensity among smallholder sorghum farmers in Western Kenya: Implications for agricultural commercialisation and food security. *Journal of Agriculture and Food Research, 27*, Article 102837. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2026.102837

Ndun, G., Therik, J. J., & Oktavianto, A. B. (2025). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan hasil sektor pertanian di Desa Suelain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. *Public Service and Governance Journal, 6*(2), 227–238.

Pangaribuan, O., & Kurniaty, E. Y. (2025). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5*(1), 1–13. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2547

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Syafira, R. R., & Rahmi, D. (2022). Peran kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies, 2*(2), 282–290. https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3286

Wijayanti, S., & Djatmiko, E. (2020). *Pemberdayaan masyarakat desa: Teori, konsep, dan implementasi*. CV Pustaka Mandiri.